Al – Qur'an dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harmonisasi Konsep Kepemimpinan)

Aris Darmawan Al Habib dan Aris Nur Qadar Ar. Razak¹

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: wawangure95@gmail.com

Abstrak

Diskursus mengenai kualifikasi menjadi seorang pemimpin selalu menjadi pembahasan yang menarik. Sebagai norma dasar Al – Qur'an dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyimpan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan ini. Keduanya menetapkan beberapa kriteria yang sangat penting dan fundamental bagi seseorang yang akan memegang tongkat kepemimpinan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis harmonisasi antara Al – Qur'an dan UUD 1945 dalam bahasan konsepsi kepemimpinan. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan antara Al – Qur'an dan UUD Tahun 1945 adalah sangat harmonis dan berkaitan khususnya pada nilai – nilai prinsipil, yaitu: keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebijaksanaan, musyawarah, Keadilan, pertanggungjawaban, dan Keteladanan.

Kata Kunci: Al – Qur'an, Konstitusi, Kepemimpinan, Harmonisasi

Abstract

The discourse about on leadership qualifications become interest to discuss. As a norm the Qur'an and the Constitution of the Republic of Indonesia, also holds a very large attention on this issue. Both of them set some very crucial and fundamental criteria for people who will be a leader. This paper was findout and analise harmonization between the Qur'an and the Constitution of the Republic of Indonesia about the conception of leadership. The results of this paper indicate that the concept of leadership between the Qur'an and the Constitution of the Republic of Indonesia is very harmonious and in related with priciples values, they are: faithful, wisdom, deliberation, justice, accountability and model.

Keywords: Al-Qur'an, Constitution, Leadership, Harmonization

A. Pendahuluan

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Islam sebagai sebuah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW diyakini mampu mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera secara lahir dan batin.² Islam yang eksis di muka bumi ini diyakini sebagai jalan kepada kehidupan yang damai, sejahtera, dan bahagia. Islam juga bukan hanya mengatur bagaimana memperoleh kesejahteraan hidup akhirat, ibadah, dan pengikhlasan diri kepada Allah saja, tapi juga mengatur cara memperoleh kebahagiaan di dunia juga.³ Tentu, untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan itu membutuhkan sebuah buku atau petunjuk manual yang bersifat Holistik – Integral. Islam mengenal buku manual itu dengan nama Al – Qur'an dan As – Sunnah. Al – Qur'an dan As – Sunnah memberikan pengaturan dan pengajaran yang terbaik tentang bagaimana berdamai dengan kehidupan di dunia.

Ar. Razzak menjelaskan bahwa Islam sebagai agama, memperkenalkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa agama Islam pada kondisi apapun tetap mampu atau dapat berinteraksi dan hidup harmonis serta memberi kedamaian (rahmah) dalam berbagai perbedaan dan keragaman yang mengitarinya. Hal ini didasari setidaknya karena dua hal, yaitu: ajaran Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam sumber hukumnya serta landasan historis – empiris yang dipraktekan oleh Nabi SAW, tak terkecuali persoalan kepemimpinan.⁴

Islam menyimpan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kepemimpinan. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di planet bumi ini. Tentu eksisnya manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, melainkan hanya untuk menjadi pemimpin yang bertujuan untuk memecahkan masalah keduniaan bersifat *sustainable* (berkelanjutan) di berbagai bidang

²Toyib dan Sugianto, 2002, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 61.

³Abuddin Nata, 1995, *Filsafat Pendidikan Islam I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 12.

⁴Aris Nur Qadar Ar. Razzak, "Agama Konstitusi (Operasionalisasi Nilai Toleransi Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 Untuk Sinergitas Antar Umat Beragama di Indonesia)", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 129.

kehidupan baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Oleh karena itu, Al-Qur'an tentu memberikan petunjuk mengenai bagaimana menjadi khalifah atau pemimpin dimuka bumi ini dengan baik dan benar.

Kepemimpinan dalam Islam selalu menjadi tajuk rencana. Kepemimpinan adalah sebuah organ untuk menggapai keinginan luhur sebuah bangsa dan negara yaitu menjadi suatu bangsa yang bahagia, sejahtera, dan damai di bawah lindungan Allah. El Syam menjelaskan kepemimpinan yang dipraktikkan Nabi Muhammad dengan menciptakan tatanan masyarakat madani, dapat dijadikan proyek percontohan dalam membangun struktur masyarakat modern.⁵

Pada konteks Indonesia, kepemimpinan juga menjadi elemen yang terpenting. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) secara jelas mengatakan bahwa pemimpin menjadi organ negara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan negara dengan tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan, persamaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan untuk semua warga. Presiden menjadi pemimpin negara dan pemerintahan Indonesia. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk berjanji dan bertugas untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan gambaran di atas, tulisan ini akan mengkaji tentang harmonisasi nilai kepemimpinan dalam Islam dan UUD 1945.

B. Pembahasan

1. Konsep Umum Kepemimpinan

Pembahasan yang paling fenomenal antara Allah dan Malaikat adalah persoalan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Peristiwa ini terekam dalam QS. al – Baqarah/2:30 sebagai berikut:

⁵Robingun Suyud El Syam, "Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social- Ummah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 371.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Pada bagian yang lain terdapat pula frasa *ulil amri* yang semakna dengan kata pemimpin. Hal ini ditemukan dalam Qs. An-Nisa/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian apabila engkau berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil amri atau pemerintah merupakan orang yang mendapat tanggungjawab untuk mengatur urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁶ Kemudian, kata kepemimpinan juga dapat disandarkan pada kata

⁶Didin Hafidhuiddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Gema Insani Perss, Jakarta, hlm. 120.

imamah. *Imamah* bermakna yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang wajib diikuti atau yang mendahului.⁷

Istilah kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang artinya dibimbing, dituntun.⁸ Kepemimpinan adalah dasar pertama dan utama (*causa prima*) dari seluruh tahapan kegiatan, atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap (mental, fisik) dari pada kelompok orang-orang, baik dalam hubungan organisasi formal maupun informal.⁹ Kepemimpinan juga merupakan hal dasar dalam menghadapi berbagai macam kerumitan dan masalah yang hadir demi mencapai suatu target yang telah idtetapkan bagi sebuah kelompok, organisasi, maupun pemerintah.

Kepemimpinan pada prinsipnya merupakan kemampuan mengatur, merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab yang diperoleh dengan tingkat kecakapan dan kecerdasan yang tinggi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam berbagai istilah (*khalifah, ulil amri*, imam, dan sebagainya) adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kualitas manajerial dalam memecahkan soal sosial (*social kwestie*) baik bidang agama, hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya demi mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Pemimpin menjadi poros kekuatan dalam membangun peradaban masyarakat yang berkualitas dan progresif. Tentu untuk menjalankan rumitnya kehidupan ini, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas pula. Mohammad Natsir mensyaratkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kecintaan pada agama selain berwibawa, amanah, dan cinta tanah air.¹⁰ Kualitas dan kapasitas pemimpin akan diperoleh apabila telah memenuhi beberapa syarat. Yusuf Musa menguti

⁷ Atabik Ali, 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 59.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 874.

⁹ Imam Munawir, 1992, *Asas – Asas Kepemimpinan Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 1.

¹⁰ Mohammad Natsir, 2001, *Agama dan Negara dalam Persektif Islam*, DDII, Jakarta, hlm. 83-84.

pendapat Al-Mawardi menjelaskan bahwa kriteria pokok seorang calon pemimpin adalah; (1) bersifat adil dalam segala hal, (2) memiliki pengetahuan untuk dapat ijtihad menyelesaikan permasalahan hukum, (3) memiliki pendengaran, mata dan ucapan yang baik/sehat agar mampu melaksanakan tanggungjawabnya, (4) sehat secara jasmani, sehingga mampu melakukan mobilisasi secara cepat, (5) cerdas mengatur urusan masyarakat dan kemaslahatan umum, (6) berani dan tegas membela warga negara untuk berhadapan dengan lawan.¹¹

Ibnu Khaldun mengungkapkan kriteria yang wajib dipenuhi seorang pemimpin yang hendak menduduki jabatan, yaitu; *pertama*, berpengetahuan yang luas, karena merupakan eksekutor syariat Allah SWT. Ia wajib berjihad dan tidak bertaklid. *Kedua*, adil, pemimpin merupakan posisi tertinggi, karena ia melingkupi jabatan politik dan agama dalam sebuah negara. *Ketiga*, memiliki kapasitas yaitu kemampuan dalam menjalankan hukum dan menghadapi lawan, ahli strategi dan serta cerdas memobilisasi masyarakat, arif serta responsif terhadap kondisi dan kuat di dalam mengendalikan politik, *keempat*, sehat secara jasmani misalnya bebas dari buta, bisu, tuli dan pekak serta bebas dari penyakit jiwa seperti gila dan hilang akal.¹²

Hal senada dijelaskan oleh Ezad bahwa diumat Islam perlu menjadikan Nabi Saw sebagai teladan. Untuk memenuhi kriteria kepemimpinan yang ideal, seorang pemimpin harus memenuhi prasyarat memiliki fisik sehat, tabah secara spiritual dan keyakinan yang kuat kepada Allah swt serta mempraktikkan semua ajaran Islam Nabi (saw) dalam memimpin masyarakat. Kriteria lain yang tidak dapat dipisahkan adalah berbudi luhur, berpengetahuan, cerdas dan teguh secara moral, demi membangun masyarakat yang dinamis.¹³ berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa seorang pemimpin memiliki beberapa kriteria yakni seorang

¹¹Yusuf Musa, 1990, *Politik dan Negara dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 59.

¹²*Ibid.*, hlm. 72.

¹³Ezad Azraai Jamsari, "The Basis of Leadership in Islam", *Advances in Natural and Applied Sciences*, Volume 6, Nomor 8, Tahun 2012, hlm. 1399.

pemimpin harus memiliki kualitas mental yang mumpuni seperti iman dan takwa kepada Allah, bertanggung jawab, bijaksana, jujur, adil, musyawarah, dan dapat diteladani oleh pengikut atau masyarakatnya.

2. Harmonisasi Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan UUD 1945

Lebih jauh dari pembahasan sebelumnya, menarik untuk melihat hal yang lebih hubungan mengenai konsep kepemimpinan Al-Qur'an dan UUD 1945. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana harmonisasi konsep kepemimpinan dalam Islam dan dalam UUD 1945? Jawaban yang paling tepat adalah dengan melihat bagaimana kedua konsep itu membangun syarat kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam dan UUD 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Iman dan Takwa Kepada Tuhan.

Seorang pemimpin (*leader*) harus memiliki kekuatan sikap iman dan takwa kepada Allah SWT. Hal ini tercantum dalam QS.Al-Imran/3:102 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Melalui pesan ini, iman dan takwa menjadi fondasi yang primer untuk menjadi seorang pemimpin. Kekuatan iman dan takwa menjadikan seorang menjadi pemimpin yang paripurna. Jelas bahwa apabila pemimpinnya beriman dan bertakwa, tentu arah kebijakan dan regulasi yang dibuatnya adalah semata-mata mencari ridho dari Allah sehingga dapat membawa rakyatnya pada kehidupan yang proporsional, tentram, dan sejahtera. Pada aspek yang lebih luas, fungsi pemimpin tidak hanya melindungi dan mengayomi warga negara, namun lebih dari itu Al –

Mawardi menjelaskan fungsi pemimpin lebih kepada memproteksi dan melindungi agama untuk menegakkan pesan – pesan langit.¹⁴

Senada denan pesan Al – Quran, konsep iman dan takwa juga terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pilar iman dan takwa menjadi ideologi dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkhusus bagi pemimpin haruslah memiliki ideologi iman kepada Allah. Misalnya seorang Presiden dan Wakil Presiden harus mengucapkan dan melaksanakan janji takwa pada saat sumpah jabatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus – lurus serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Klasul pasal konstitusi ini mengabarkan bahwa sebelum Presiden dan Wakil Presiden memangku tugas dan tanggung jawab, hal pertama yang dilakukan adalah mengangkat sumpah untuk melaksanakan segala kepentingan dan kebutuhan rakyat dengan penuh ketakwaan. Takwa dalam artian percaya bahwa kekuasaan tersebut adalah rahmat dari Allah sehingga setiap kerja yang dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT. Selanjutnya, Presiden berjanji untuk menggunakan kekuasaannya demi melindungi semua sektor kepentingan baik kepentingan negara, bangsa, maupun agama karena Allah SWT.

¹⁴A. F. Djunaedi, 2005, *Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam*, Edisi XIII, Al-Mawarid, hlm. 60.

Konsep takwa iman dan takwa terdapat pada salah satu poin pembukaan UUD 1945 (paragraf keempat). Ketakwaan itu tercermin dalam butir kepercayaan kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsep ini mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mengimani dan mengamalkan nilai-nilai Ketuhanan dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia.

1. Prinsip hikmah

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghadirkan hikmah bagi kehidupan bangsa, negara, dan agama. Hal ini tertuang dalam QS. Al-Nahl/16:125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Allah berpesan melalui Al – Qur'an bahwa seorang pemimpin harus mengajak rakyatnya kejalan yang baik dan benar dengan penuh nasehat serta kebijaksanaan. Arahnya adalah membawa masyarakat pada pembelajaran yang baik. Seruan ini bertujuan agar masyarakat mendapat petunjuk sehingga terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan kekacauan dan maksiat didalam masyarakat. Seorang pemimpin Islam haruslah memiliki jiwa menyeruh kepada jalan Allah yang penuh dengan kebenaran dan kebaikan agar mendapatkan petunjuk dan hidayah. Seruan yang dapat membentuk kecintaan masyarakat kepada ketaatan kepada segala bentuk perintah dan larangan Allah SWT.

UUD 1945 memberikan hak dan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemimpin untuk membuat peraturan yang dapat mengajak rakyatnya pada kebaikan. Hak ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Hak itu

berkaitan dengan presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan menetapkan peraturan pemerintah. Melalui hak ini, Presiden dapat mengajukan dan membuar regulasi yang porosnya ialah peraturan itu mengandung ajakan untuk kebaikan dan kedamaian sehingga hadir keadaan yang kondusif dan seimbang kepada warga negara dan warga agama diseluruh Indonesia. Namun bukan hanya sebatas pada konsep pembuatan peraturan saja, akan tetapi Presiden harus mengajak masyarakat untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh kesungguhan dan kepatuhan sesuai dengan amanat konstitusi.

b. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah suatu desain komunikasi dengan melibatkan semua unit masyarakat secara seimbang dalam halikut serta pada pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan publik. Prinsip musyawarah tertuang dalam QS. Ali 'Imran/3:159 sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Kata musyawarah dalam ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan atau masalah. Allah memerintahkan seseorang terlebih pemimpin untuk bersikap lemah lembut dalam menerima segala kritik, saran, dan pendapat dalam sebuah musyawarah bersama. Veiithzal Rivai mengatakan bahwa Al-Qur'an secara gamblang menyebutkan bahwa seseorang yang mengatasnakan dirinya pemimpin harus melakukan

musyawarah dengan orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan baik.¹⁵ Musyawarah adalah jalan untuk mendapatkan keputusan bersama akan satu permasalahan yang hadir. Melalui metode musyawarah, tidak ada suatu persoalanpun yang hadir tidak dapat dijawab dan diselesaikan. Tentu dengan prinsip menyeru pada hikmah. Islam mengajarkan bahwa setiap kerumitan yang hadir di dalam masyarakat maka haruslah didiskusikan dengan jalan musyawarah demi mendapatkan keputusan yang baik bagi kemaslahatan umat. Jiwa musyawarah inilah yang wajib ada dalam jiwa seorang pemimpin Islam untuk menjalankan kepemimpinannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep musyawarah juga dibangun oleh negara Indonesia. Negara Indonesia lahir dari hasil perjuangan musyawarah oleh para pendiri bangsa. Konsep musyawarah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (*Dokuritsu Junbi Inkai*) sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar inisialisasi dalam Pembukaan UUD 1945 (paragraf keempat) sebagai berikut "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Bahwa salah satu pilar dalam menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia ialah menggunakan konsep permusyawaratan. Menurut konsep ini kepemimpinan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan akan diperoleh apabila melalui jalan permusyawaratan yang diwakilkan baik kepada eksekutif maupun legislatif. Para pendiri bangsa menetapkan ini agar setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh para pemimpin harus melewati fase permusyawaratan agar tidak terjadi gerakan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa). presiden sebagai pemimpin tentu harus melakukan musyawarah dengan berbagai elemen baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik untuk memecahkan masalah secara bersama. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila ia tidak bermusyawarah dengan rakyatnya.

c. Prinsip Keadilan

¹⁵Veithzal Rivai, 2004, *Kiat Memimpin Abad ke – 21*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16.

Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu berada diatas semua golongan tanpa diskriminasi. Memandang kebenaran adalah kebenaran dan sebaliknya memandang kesalahan adalah kesalahan. Dia tidak memihak pada suatu kelompok dan golongan tertentu. Kalimat diatas dikenal dengan konsep keadilan. Hal ini terdapat dalam QS.An-Nisa/4:58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Prinsip fundamental yang wajib dipegang oleh seorang pemimpin dalam Islam adalah hanya pada kebenaran dan jalan yang lurus. Prinsip dan timbangannya adalah berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mendapatkan keadilan. Keadilan adalah tidak memandang kasta, suku, ras, agama, dan lainnya akan tetapi berpegang pada kebenaran dan fakta. Kebencian seorang pemimpin akan suatu kaum bukan menjadi alasan pembenar untuk tidak berbuat adil. Pemimpin yang adil akan membawa sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan bahagia. Sifat adil harus menjadi pedoman seorang pemimpin dalam memecahkan permasalahan yang hadir dimasyarakat agar mendapatkan jawaban yang dapat memuaskan semua pihak.

Bagi bangsa Indonesia, keadilan merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Hal ini terlihat jelas dalam janji sumpah jabatan presiden dalam Pasal (9) UUD 1945 yang bermakna bahwa Presiden berjanji untuk melakukan tugas dengan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bukan kepada kepentingan suku, golongan, ras, etnis, dan agama saja. Konsep keadilan yang

dibangun oleh Presiden yaitu harus berdasar pada nilai-nilai konstitusi yang secara lengkap terdapat dalam beberapa pasal UUD 1945 seperti keadilan hukum Pasal 27, keadilan menyatakan pendapat Pasal 28, keadilan untuk mendapatkan akses berketuhanan dan kepercayaan Pasal 29, keadilan untuk mendapat pengajaran Pasal 31, dan masih banyak keadilan lainnya.

Konsep keadilan juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa konstitusi menginginkan agar Presiden sebagai pemimpin harus mampu menciptakan dan memberikan rasa keadilan yang proporsional bagi segenap rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan memastikan masyarakat mendapatkan itu.

d. Prinsip Amanah

Seorang pemimpin harus memiliki sifat dasar yang dapat dipercaya dan menggenggam semua tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan penuh kesadaran. Kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya ialah kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan sikap kejujuran dan jauh dari sifat kemunafikan. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam QS. Al-Mu'minun/23:8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada siapa saja terlebih para pemimpin untuk memelihara kepercayaan yang telah diamanahkan. Janji-janji yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dan dibuktikan bukan untuk diingkari. Memelihara kepercayaan oleh pemimpin akan dibayar dengan kepatuhan warga masyarakatnya. Islam sangat menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan harus dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya. Allah mencintai para pemimpin yang mengaktualisasikan

setiap janjinya untuk diberikan kepada masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekacauan dan konflik kepentingan antar masyarakat.

Pesan untuk memelihara dan melaksanakan amanah, juga dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia dalam prosesi sumpah janji jabatannya. Ini tercermin dalam kata-kata yang diucapkan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (9) UUD 1945 sebagai berikut:

“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal ini ingin membuktikan bahwa seorang pemimpin wajib melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan penuh kesungguhan dan memelihara semua janji yang telah diucapkan itu. Konsep amanah ini bertujuan untuk mengingatkan kepada pemimpin bahwa kekuasaan yang dimandatkan oleh masyarakat tidak disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menyesengsarakan rakyat. Seorang pemimpin harus bisa menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi semua janji-janji demi penegakkan kedaulatan rakyat.

e. Prinsip Keteladanan

Pemimpin ialah seseorang yang pribadinya dapat dijadikan teladan dan panutan oleh yang dipimpinnya. Hal ini tercantum di dalam QS. al – Ahzab/33:21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ٢١

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Allah secara eksplisit mengatakan bahwa Rasulullah (pemimpin) adalah pribadi yang penuh dengan keteladanan yang baik. Kejayaan dalam memimpin umat manusia seberapa besar ditunjang (*support*) oleh aspek penampilan dan kepribadian rasul yang cerdas akal, santun ucapannya, bijaksana putusannya serta tegastindakannya sehingga Allah memposisikan Rasulullah SAW sebagai sumber referensi dalam pembelajaran mental dan moral. Olehnya itu, setidaknya seorang pemimpin harus belajar melalui gaya kepemimpinan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Bagi bangsa Indonesia dengan sebaran manusia muslim terbesar di muka bumi, Nabi Agung Muhammad SAW. menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam sample pembinaan akhlak masyarakat Indonesia. Olehnya itu, Presiden sebagai seyogyanya harus menangkap pesan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai keteladanan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat dalam UUD 1945 seperti menjadi teladan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Pasal 4 ayat (1), teladan dalam mengajukan dan menetapkan peraturan Pasal 5 ayat (1) dan (2), teladan dalam urusan dalam pertahanan dan keamanan negara Pasal 10, dan yang paling penting adalah teladan dalam menjalankan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1)). Pada akhirnya, konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kesamaan ide dan gagasan. Hal ini membuktikan bahwa konsep kepemimpinan dalam UUD 1945 memiliki persamaan dengan pesan Al-Qur'an.

C. Penutup

Konsep kepemimpinan yang dibangun oleh Al-Qur'an dan UUD 1945 memiliki kesamaan ide dan gagasan walaupun terdapat perbedaan dari segi dalam istilah dan pengucapannya seperti: *Khalifah, Ulil Amri, Imamah*, Presiden, dan lain sebagainya. Namun substansi konsepnya bertemu dan harmoni dalam beberapa prinsip yaitu, prinsip iman dan takwa kepada Allah, prinsip hikmah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip amanah (dapat dipercaya), dan prinsip keteladanan. Hal ini membuktikan bahwa konsep kepemimpinan yang dibangun oleh Negara Republik Indonesia melalui norma dasar yang disebut sebagai konstitusi sejatinya dijiwai dari nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Atabik, 1998, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Djunaedi A. F., 2005, *Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam*, Edisi XIII, Al-Mawarid.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Gema Insani Perss, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Munawir, Imam, 1992, *Asas – Asas Kepemimpinan Islam*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Musa, Yusuf, 1990, *Politik dan Negara dalam Islam*, Al – Ikhlas, Surabaya.
- Nata, Abuddin, 1995, *Filsafat Pendidikan Islam I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Natsir, Mohammad, 2001, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, DDII, Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2004, *Kiat Memimpin Abad ke – 21*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Toyib dan Sugianto, 2002, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Artikel Jurnal

Ar. Razzak, Aris Nur Qadar, “Agama Konstitusi (Operasionalisasi Nilai Toleransi Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 Untuk Sinergitas Antar Umat Beragama di Indonesia)”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.

Syam, Robingun Suyud El, “Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social- Ummah”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Ezad Azraai Jamsari, “The Basis of Leadership in Islam”, *Advances in Natural and Applied Sciences*, Volume 6, Nomor 8, Tahun 2012.